

PENATAAN LINGKUNGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (Suatu Studi Program P2KP di Kota Bandung)

Oleh : Ikaputera Waspada*)

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi negara-negara berkembang (development countries), termasuk Indonesia. Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai salah satu bentuk program pemerintah mengatasi kemiskinan.

Penelitian ini bertujuan; (1). Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh partisipasi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia terhadap keberhasilan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di kota Bandung, (2). Untuk menemukan faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan program anti kemiskinan.

Metode penelitian ini adalah metode survey eksplanatori pada anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai penerima dana P2KP di kota Bandung, yang meliputi 6 (enam) wilayah kerja. Penelitian ini terpilih secara propotional sampling.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) di kota Bandung.

Penelitian ini telah mengungkapkan bahwa keberhasilan penataan kemiskinan perkotaan (P2KP) di kota Bandung masih rendah. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya partisipasi masyarakat peduli, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Kata kunci : Penataan Kemiskinan

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan di Indonesia sekarang sangat mendesak untuk ditangani. Wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak dimilikinya akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai. Kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan, dan mata pencaharian yang tidak menentu.

*) Drs. Ikaputera Waspada, MM., adalah dosen Program Ekonomi dan Koperasi Jurusan Pendidikan Ekonomi FPIPS UPI.

Disadari bahwa kemiskinan adalah persoalan struktural dan multidimensional, yang mencakup politik, sosial, ekonomi, asset. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Suryana (2000:30):

Fenomena keterbelakangan haruslah ditinjau dari konteks nasional dan internasional secara global. Kekuatan-kekuatan ekonomi, social, internal dan eksternal bertanggungjawab terhadap terjadinya kemiskinan dan ketidakadilan, produktivitas yang rendah biasanya menjadi tanda atau karakteristik negara sedang berkembang pada umumnya.

Untuk itu dibutuhkan peran dan fungsi pemerintah yang lebih besar dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Pemerintah sebagai enterpreneur/ pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi agen pembangunan (*development agent*). Untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi, maka diperlukan adanya program pembangunan anti kemiskinan yang dilakukan pemerintah melalui program yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Kegagalan program yang selama ini dilakukan, lebih disebabkan oleh sistem yang diterapkan terlalu sentralistik sehingga, seringkali program tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak tepatnya program menjangkau sasaran tentunya akan berdampak pada jumlah penduduk miskin yang terus bertambah, hasil penelitian menyatakan

Angka penduduk miskin di Indonesia diperkirakan naik dua persen menjadi 40 juta/jiwa. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2004 berjumlah 36,17 juta/jiwa (16,7% dari 220 juta penduduk Indonesia). Standar kemiskinan mengacu pada Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan ukuran konsumsi penduduk di bawah Rp. 123 ribu/kapita/bulan. (Republika, 14 Maret 2005).

Kemiskinan di Indonesia menunjukkan angka yang fantastis, yakni berjumlah 40 juta jiwa. Ketimpangan pendapatan yang terjadi merupakan salah satu penyebab kemiskinan yang terjadi tidak hanya dipedesaan. Namun kondisinya kini sudah meluas pada tingkat perkotaan. Meluasnya kemiskinan diperkotaan dirasakan juga oleh daerah-daerah yang ada di Indonesia, termasuk kota Bandung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka penduduk miskin di kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 1.

Table 1.
Jumlah Penduduk Kota Bandung

Indikator	2001/2002	2002/2003	2003/2004
Pra Keluarga Sejahtera	5.060	5.403	5.779
Keluarga Sejahtera I	79.175	80.973	82.040
Keluarga Sejahtera II	124.774	120.087	115.625
Keluarga Sejahtera III	123.900	124.627	124.786
Keluarga Sejahtera III/plus	32.670	33.489	35.456
Jumlah	465.235	470.649	476.336

Sumber : BPS, Kota Bandung dalam angka 2001,2002,2003 (data diolah)

Orientasi berbagai kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan yang hanya bersifat parsial, sektoral, dan tidak menyentuh akar penyebab kemiskinan. Akibatnya, program-program dimaksud tidak dapat menumbuhkan kemandirian masyarakat yang pada akhirnya tidak mampu mewujudkan aspek keberlanjutan (*sustainability*) dari program-program penanggulangan kemiskinan. Salah satu program yang diupayakan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan khususnya wilayah perkotaan adalah dengan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Program yang bergulir sejak tahun 1999 dengan pembiayaan dari Bank Dunia (*World Bank*), dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama, dengan lokasi sasaran meliputi 1.131 kelurahan/desa yang tersebar di 54 kota/kabupaten di wilayah luar pulau Jawa. Tahap kedua, dilaksanakan di 927 kelurahan/desa yang tersebar di 26 kota/kabupaten di pulau Jawa. Untuk wilayah Jawa Barat sendiri mencakup 5 daerah kota dan 9 daerah kabupaten (14 dari seluruh Dati II), 592 kelurahan dengan bantuan sebesar Rp. 211,5 milyar. Khusus untuk kota Bandung pelaksanaan dilakukan dalam dua tahap yakni, tahap satu mulai November 1999 sampai bulan Maret 2002 yang menjangkau 104 kelurahan dengan jumlah dana yang dikucurkan mencapai 34,5 milyar. Untuk tahap kedua, dimulai bulan Juli 2002 sampai Juli 2004.

Namun, dalam perjalanannya program P2KP tidak berjalan mudah seperti apa yang telah direncanakan. Buktinya tingkat kemiskinan di kota Bandung jumlahnya terus bertambah. Data BPS mencatat jumlah penduduk kota Bandung tahun 2003/2004 berjumlah sekitar 2.228.268 jiwa atau bertambah sekitar 4,01 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.142.194. Pelaksanaan program P2KP belum berhasil adalah banyaknya dana yang tidak tepat sasaran dan tingkat kemacetan dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam mengembalikan dana pinjaman, sebagaimana laporan Bappeda dalam *progress report*.

Tabel 2.
Klasifikasi Persentase berdasarkan Tingkat Kemacetan BKM

Persentase Kemacetan Per BKM	Frekuensi	Persentase (%)
0 % - 20 %	12	11,53
20,01 % - 40 %	33	31,73
40,01 % - 60 %	34	32,69
60,01 % - 80 %	14	13,46
80,01 % - 100 %	1	0,96
Jumlah	104	100 %

Sumber : Bappeda Kota Bandung, 2004

Program P2KP belum berjalan secara efektif. Hal ini terjadi karena masih lemahnya kontrol dan keterlibatan masyarakat dalam program. Ada dugaan penyimpangan yang dilakukan pengurus. Sebagaimana dikemukakan Moeljarto (1993:49):

Pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya akan berhasil, apabila dalam proses pembangunan tersebut melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, peran pemerintah, peran organisasi pelaksana, sebagai pendorong inisiatif pembaharuan dan pembangunan masyarakat (*development agent*).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengungkap faktor keberhasilan penataan lingkungan kemiskinan melalui program P2KP di kota Bandung, dengan judul penelitian ini : PENATAAN LINGKUNGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (Suatu Studi Program P2KP di Kota Bandung)

b. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, karena banyaknya faktor yang mempengaruhi keberhasilan penanggulangan kemiskinan dan mengingat keterbatasan ilmu yang dimiliki, maka peneliti telah membatasi permasalahan yang diteliti. Untuk itu penulis merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia terhadap keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di kota Bandung ?
- 2) Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat, terhadap keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di kota Bandung ?
- 3) Bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di kota Bandung ?

c. Tujuan Penelitian

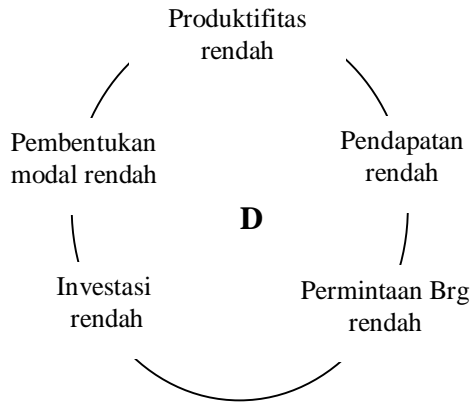
- 1) Untuk mengetahui gambaran partisipasi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia terhadap keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di kota Bandung.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia terhadap keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di kota Bandung.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di kota Bandung.
- 4) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di kota Bandung.

2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Pembangunan yang dilakukan negara-negara berkembang dalam mengatasi masalah keterbelakangan, hendaknya berorientasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Suryana (2000:30) “ Pokok sasaran pembangunan adalah pemberantasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan dan pemberantasan ketimpangan ”. Pendapat serupa dikemukakan Todaro (2000:178) “ Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan kini merupakan masalah pokok dalam pembangunan di banyak negara ”.

Kemiskinan yang terjadi di negara berkembang lebih disebabkan kemiskinan absolut, yakni kemiskinan yang disebabkan oleh negara miskin itu sendiri yang memiliki kemiskinan baik dari sisi permintaan maupun penawaran, atau lebih dikenal dengan istilah lingkaran yang tak berujung pangkal (*vicious cycle*). Dimana, kekurangan kapital dan tabungan mengakibatkan investasi rendah. Tabungan yang rendah sebagai akibat pendapatan rendah. Rendahnya tingkat pendapatan disebabkan tingkat produktivitas tenaga kerja rendah dan

rendahnya pemanfaatan sumber daya alam, tanah, dan kapital. Untuk lebih jelas mengenai *vicious cycle* dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1.
Lingkaran Kemiskinan Yang Tak Berujung Pangkal
Sumber : Suryana (2000:45)

Menurut penganut fungsionalisme, kemiskinan timbul sebagai akibat dari tidak berfungsinya (disfungsional) salah satu elemen sistem sosial (sub-sistem) yang ada dalam masyarakat. Merton (Supriatna, 1997:150):

Konsep disfungsional ini sangat berguna dalam mengembangkan suatu pendekatan fungsional terhadap masalah sosial. Analisis fungsional memberikan gambaran suatu kerangka untuk melihat dilema kebijakan sosial yang diarahkan untuk menanggulangi masalah sosial tersebut.

Selanjutnya untuk memahami disfungsional dalam masyarakat berupa kemiskinan, menurut Parsons (Israwan, 2000:21) dapat digunakan teori fungsional-struktural. Strategi dasar pendekatan ini adalah : (1) mengidentifikasi persyaratan-persyaratan fungsional yang pokok dalam sistem yang sedang dipelajari; (2) menganalisis struktur-struktur tertentu dengan mana persyaratan-persyaratan fungsional ini dipenuhi.

Teori fungsional Parsons, oleh Merton dipandang sebagai teori yang abstrak dan agak muluk. Dalam pandangan Merton, pendekatan fungsional bukanlah suatu pendekatan yang komprehensif dan terpadu, melainkan suatu strategi untuk analisis. Oleh karenanya Merton kemudian mengembangkan analisis fungsional taraf menengah, guna menghubungkan perkembangan teori yang lebih dekat dengan dunia empirik. Salah satu teori fungsional taraf menengah dari Merton adalah mengenai kepribadian birokratif (*bureaucratic personality*). Merton mengemukakan :

“ Satu konsekuensi disfungsional dari kepercayaan yang terlampau besar terhadap peraturan adalah bahwa kaum birokrat itu akhirnya melihat kepatuhan terhadap peraturan sebagai tujuan dan akibatnya mereka tidak mampu untuk menjawab tantangan situasi baru secara fleksibel. Akibatnya

pencapaian utama dari organisasi itu menjadi terhalang. (Supriatna, 1997:22-23).

Berdasarkan uraian diatas, pelaksanaan program P2KP sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dapat didekati dan dianalisis melalui pendekatan fungsional ini. Yaitu dengan mencermati berfungsinya elemen-elemen penting dalam pelaksanaan program P2KP adalah : (1) Program P2KP sebagai suatu kebijakan pembangunan; (2). Masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran pembangunan; (3). Lembaga Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai pelaksana program; (4). Komunikasi program sebagai proses pencapaian tujuan. Keberhasilan program P2KP akan terjadi apabila seluruh elemen tersebut bekerja dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Keberhasilan program selanjutnya dapat dicermati dari berfungsinya mekanisme program tersebut. Berdasarkan pendekatan fungsional, keberhasilan program akan terwujud apabila terjadi interaksi secara seimbang antar sub-sistem, yaitu komunikasi antara pemerintah, masyarakat kelompok sasaran, dan lembaga pelaksana (BKM). Terjadinya disfungsi pada salah satu sub-sistem tersebut, pada akhirnya akan menghambat pencapaian tujuan (keberhasilan) program. Guna mengkaji pencapaian tujuan program P2KP tersebut, penelitian ini mencermati faktor-faktor partisipasi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan teori di atas, maka dapat dipahami bahwa keberhasilan program akan sangat ditentukan oleh adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan. Karena menurut Korten " Keterlibatan masyarakat merupakan inti dari pembangunan. Partisipasi merupakan salah satu wujud tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan". (Israwan, 2000: 29-30). Tuntutan pentingnya partisipasi masyarakat ini semakin besar apabila tujuan pembangunan diarahkan untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Melalui partisipasi pembangunan, masyarakat dapat meningkatkan kemampuannya, serta mengembangkan kemandirian, sehingga kualitas sumber daya manusia dapat dicapai.

Partisipasi menurut Mubyarto (1991:40) diartikan sebagai kesediaan seseorang untuk membantu berhasilnya setiap program berdasarkan kemampuan, tanpa mengorbankan kepentingan sendiri. Pembangunan sebagai proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya mengandung arti bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam proses tersebut. Karenanya Conyers mengatakan terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam pembangunan, yaitu:

Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program jika mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, Karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut. Ketiga, adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi apabila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. (Supriatna, 1997: 30).

Bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan oleh masyarakat penerima program pembangunan Moeljarto (1993:87), Billah (1987:146) terdiri dari partisipasi dalam identifikasi masalah pembangunan, pengambilan keputusan tentang kegiatan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi program pembangunan.

Selain partisipasi masyarakat, juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Menurut Sedarmayanti (2000:15)

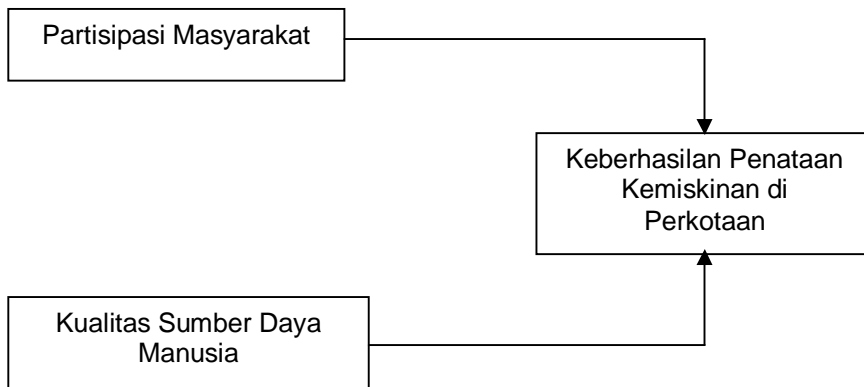
Sumber daya manusia merupakan asset utama suatu organisasi yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Mereka mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status dan latar belakang pendidikan, usia, jenis kelamin yang heterogen, yang dibawa kedalam organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi.

Manusia sebagai pengelola dari program tentunya harus dibekali dengan sejumlah kemampuan dan keterampilan dalam menjalankan program. Hal ini serupa dengan apa yang dikemukakan Robins (1994:40)

Keberhasilan suatu program dipengaruhi oleh adanya tujuan yang jelas, adanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan menjalankan program, struktur organisasi, adanya partisipasi masyarakat, sistem nilai yang dianut.

Kualitas sumber daya manusia diukur dari tingkat pengetahuan yang diwujudkan dengan tingkat pendidikan baik formal maupun informal, pengalaman, dan kemampuan/keterampilan yang dimiliki. Pelaksanaan program P2KP haruslah di tunjang oleh kemampuan sumber daya manusia yang memadai, tanpa adanya kemampuan tersebut, dapat berakibat pada gagal program pembangunan yang direncanakan.

Dari pemikiran-pemikiran di atas, maka dapat ditarik kesimpulan guna dijadikan kerangka berpikir oleh peneliti berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi keberhasilan penataan kemiskinan di perkotaan sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Konseptual penelitian

3. Hipotesis

Adapun rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Partisipasi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di kota Bandung.
- 2) Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di kota Bandung.
- 3) Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di kota Bandung.

4. Metode Penelitian

a. Objek dan Metode Penelitian

Objek penelitian adalah partisipasi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi keberhasilan penataan kemiskinan di perkotaan. Mereka adalah penduduk miskin yang menerima bantuan dana P2KP dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di wilayah Kota Bandung. Adapun metode penelitian ini adalah survei.

b. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah penduduk (Kepala Keluarga) miskin yang tergabung dalam KSM dan mendapat bantuan dana program P2KP. Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung jumlah seluruh penduduk miskin yang menerima dana P2KP tersebar di 26 Kecamatan, 139 Kelurahan yang ada di Kota Bandung, dalam hal ini berjumlah sekitar 6.125 KSM. Dengan menggunakan rumus di atas, maka diperoleh sampel sebanyak 98,39 KSM atau dibulatkan menjadi 99 KSM, yang tersebar di di Kota Bandung.

Untuk penyebaran sampel wilayah, berdasarkan pemetaan yang dilakukan BAPPEDA maka, dibagi menjadi 6 (lima) zona wilayah berdasarkan Koordinator Manajemen Wilayah (KMW) yang ada di BAPPEDA Kota Bandung, seperti ditunjukkan dalam tabel berikut;

Tabel 3.
Pembagian Wilayah KSM P2KP Kota Bandung

Wilayah	KSM	Sample KSM
Bojonegara	1295	21 KSM
Cibeunying	1105	18 KSM
Ujung berung	656	11 KSM
Tegal Lega	1248	20 KSM
Gede Bage	673	11 KSM
Karees	1149	18 KSM

c. Operasional Variabel

- 1) Partisipasi Masyarakat adalah frekuensi dan intensitas keterlibatan masyarakat melalui KSM dalam kegiatan identifikasi masalah, pengambilan keputusan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.
- 2) Kualitas SDM adalah penduduk yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan terhadap arah pencapaian tujuan organisasi.

- 3) Keberhasilan Penataan kemiskinan perkotaan adalah tingkat keberhasilan pencapaian tujuan program P2KP dengan tolak ukur diantaranya, berkurangnya jumlah penduduk miskin, meningkatkannya perkembangan usaha

Tabel 4
Operasional Variabel Penelitian

Konsep Teoritis	Konsep Empiris	Konsep Analitis	Skala
Variabel Bebas (X) 1. Partisipasi Masyarakat	Frekuensi dan intensitas keterlibatan masyarakat melalui KSM dalam kegiatan identifikasi masalah, pengambilan keputusan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.	Data diperoleh dari jawaban responden mengenai; <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi dalam pembuatan keputusan • Partisipasi dalam perencanaan program • Partisipasi dalam pelaksanaan program • Partisipasi dalam pengawasan program • Partisipasi dalam evaluasi program 	Ordinal
2. Kualitas Sumber Daya Manusia	Penduduk yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan terhadap arah pencapaian tujuan organisasi.	Data diperoleh dari jawaban responden mengenai; <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan pengelola program • Pengamalan yang dimiliki pengelola program • Kemampuan/keahlian yang dimiliki pengelola program 	Ordinal
Variabel Terikat (Y) Keberhasilan Penataan Kemiskinan perkotaan	Tingkat keberhasilan pencapaian tujuan program P2KP dengan tolak ukur diantaranya, berkurangnya jumlah penduduk miskin, meningkatkannya perkembangan usaha	Data diperoleh dari jawaban responden mengenai; <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat miskin • Kemampuan program meningkatkan pendapatan masyarakat miskin • Kemampuan program mengembangkan usaha masyarakat miskin • Keberlanjutan program 	Ordinal

d. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Observasi, yaitu melakukan observasi objek penelitian kelompok KSM di Kota Bandung
- 2) Wawancara yaitu mendata sumber informasi melalui tanya jawab dan daftar pertanyaan dengan pihak KSM di Kota Bandung
- 3) Studi kepustakaan yaitu mempelajari dan mengkaji teori-teori pembangunan yang berkaitan dengan masalah kemiskinan dan

pembangunan, mengumpulkan data dari laporan hasil penelitian, buku sumber, makalah, yang dengan KSM dan program P2KP.

Berdasarkan jenisnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini telah melakukan uji coba angket kepada KSM dengan uji validasi dan uji realibilitas.

e. Teknik Analisis Data

Untuk menguji hipotesis digunakan regresi berganda. Perumusan model, yaitu menentukan hubungan variabel dependen dengan variabel independen. Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini, Variabel Partisipasi Masyarakat (X1), dan Kualitas Sumber Daya Manusia (X2) sebagai variabel bebas, dan Keberhasilan Program Penanggulangan Kemiskinan(Y) sebagai variabel terikat.

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + e$$

Keterangan :

β_0 = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi

Y = Keberhasilan penataan Kemiskinan perkotaan

X1 = Partisipasi Masyarakat

X2 = Kualitas Sumber Daya Manusia

e = *Error variabel*

Selanjutnya dilakukan pengujian simultan (F) dan pengujian parsial (t) serta uji koefisien determinasi (R^2) dengan taraf signifikansi 95%.

5. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

a. Deskriptif Objek Penelitian

Luas Kota Bandung sekitar 16.729,15 Ha, yang terbagi menjadi 26 Kecamatan dan terdiri dari 139 Kelurahan. Dengan demikian Kota Bandung memiliki 139 BKM pengelola P2KP yang perkembangan satu dengan yang lainnya tidak sama. Penelitian yang dilakukan mencakup kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin di Kota Bandung dan menerima dana P2KP. Dari 139 Kelurahan yang ada di Kota Bandung dan memiliki BKM, peneliti dalam hal ini melakukan penelitian terhadap 99 responden yang tersebar di 6 wilayah yang ada di Kota Bandung. Dari penelitian, penulis memperoleh gambaran sebagai berikut;

Tabel 4.

Data Responden Berdasarkan Klasifikasi Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	
	F	%
Ibu Rumah Tangga (IRT)	35	35.35
Pedagang	20	20.20
Konveksi	7	7.07
Wiraswasta	36	36.37
Buruh	11	11.11
Jumlah	99	100

Jika di lihat data responden berdasarkan klasifikasi pekerjaan yang dilakukan maka, terlihat kebanyakan responden yang menerima dana P2KP di dominasi oleh penduduk yang bermata pencaharian sebagai wiraswasta yang jumlahnya mencapai 36.37% dari total sampel penelitian. Sedangkan untuk jenis pekerjaan lain yang dilakukan adalah, IRT yang mencapai 35.35 %, Pedagang 20.20 %.

b. Deskriptif Penataan Kemiskinan perkotaan

1) Partisipasi Masyarakat

Karakteristik penting yang menandai pelaksanaan P2KP adalah adanya komitmen dari Pemerintah untuk mewujudkan partisipasi yang tinggi dari kelompok sasaran (masyarakat miskin) dalam kegiatan program. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan tingkat partisipasi masyarakat miskin dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung, dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini;

Tabel 5
Tingkat Partisipasi Masyarakat

Kriteria	Banyak(F)	Persentase
Rendah	54	54.55
Sedang	20	20.20
Tinggi	25	25.25

Tabel 5. di atas menunjukkan bahwa criteria tingkat partisipasi masyarakat rendah, sedang dan tinggi. Kriteria itu diartikan bahwa frekuensi intensitas keterlibatan masyarakat melalui KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Adapun kriteria rendah 54.55% tingkat partisipasi masyarakat. Sedangkan kriteria tinggi 25.25% tingkat partisipasi masyarakat.

2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Manusia merupakan salah satu sumber daya yang diperlukan dalam proses pembangunan. Bagi negara berkembang SDM merupakan aset utama yang menjadi motor penggerak pembangunan. Semakin berkualitas SDM tentunya hasil pembangunan akan semakin mudah dicapai. Demikian upaya pengentasan kemiskinan harus di mulai perbaikan kualitas SDM. Dalam penelitian ini salah satu dimensi yang dikaji adalah kualitas sumber daya manusia dari kelompok sasaran penerima program P2KP yang meliputi aspek, pengetahuan diukur dari tingkat pendidikan formal dan non formal. Pendidikan non formal dilihat dari frekuensi mengikuti pendidikan dan latihan (diklat), pengalaman yang dimiliki, serta keterampilan / keahlian yang dimiliki. Dimensi-dimensi tersebut tergambar pada tabel berikut;

Tabel 6.
Kualitas SDM

Kriteria	Banyak (F)	Persentase
Rendah	15	15.15
Sedang	21	21.21
Tinggi	63	63.64

Tabel 6. di atas menunjukkan bahwa criteria tingkat kualitas sumberdaya manusia rendah, sedang dan tinggi. Kriteria itu diartikan bahwa penduduk yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan pencapaian tujuan organisasi. Adapun kriteria rendah 15.15% kualitas sumberdaya manusia. Sedangkan kriteria tinggi 63.64% kualitas sumberdaya manusia.

c. Keberhasilan penataan kemiskinan di Kota Bandung

Keberhasilan suatu penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari berbagai komponen yang mengindikasinya. Kondisi tersebut ada tidaknya kesesuaian antara program dengan kebutuhan, ada tidaknya peningkatan sisi pendapatan masyarakat miskin, ada tidaknya kemajuan dari segi usaha yang dijalani, serta ada tidaknya keberlanjutan program.

Tabel 7.
Keberhasilan Penataan kemiskinan

Kriteria	Banyak (F)	Persentase
Rendah	20	20.20
Sedang	20	20.20
Tinggi	54	59.60

Tabel 7. di atas menunjukkan bahwa criteria tingkat keberhasilan pencapaian tujuan program rendah, sedang dan tinggi. Kriteria itu diartikan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan program berkurangnya penduduk miskin dan meningkatkan perkembangan usaha. Adapun kriteria tinggi 59.60% keberhasilan penataan kemiskinan. Sedangkan kriteria rendah 20.20% keberhasilan penataan kemiskinan.

d. Analisis Data

Dalam penelitian ini variabel yang diteliti dan diduga mempengaruhi keberhasilan program penanggulangan kemiskinan adalah partisipasi masyarakat (X1), dan Kualitas Sumber Daya Manusia (X2). Untuk mengambil keputusan terhadap hipotesis penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka pengujian hipotesis dilakukan secara simultan dan secara parsial. Hasil pengolahan melalui bantuan program SPSS dapat dianalisis dan dijelaskan sebagai berikut;

e. Persamaan Regeresi Linier Berganda

Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh perubahan masing-masing variabel bebas (independen) terhadap keberhasilan penataan kemiskinan di perkotaan, dapat diketahui melalui koefisien korelasi regresi. Dari hasil pengolahan data melalui program SPSS, koefisien regresi dalam penelitian dapat dilihat pada

Tabel 8. Adapun koefisien determinan (R^2) adalah 0.678 dengan nilai F_{hitung} sebesar 20.006 pada tingkat $\alpha = 0.05$. Setelah dilakukan pengujian data yang diperoleh dari jawaban responden, maka dapat disimpulkan, pengaruh secara parsial variabel Partisipasi Masyarakat (X1), dan Kualitas SDM (X2) terhadap keberhasilan penataan kemiskinan dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8.
Kesimpulan Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien Regresi	T _{tabel}	T _{hitung}	Penafsiran
Partisipasi Masyarakat (X1)	0,640	1,63	5,968	Signifikan
Kualitas SDM (X2)	0,5583	1,63	3,199	Signifikan

f. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis bahwa secara simultan variabel yang terdiri dari Partisipasi Masyarakat dan Kualitas SDM mempunyai pengaruh yang nyata terhadap keberhasilan penataan penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP). Hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat, dan semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka keberhasilan penataan kemiskinan di perkotaan (P2KP) di Kota Bandung akan semakin meningkat. Untuk itu program P2KP yang dijalankan selama ini diharapkan mampu sebagai stimulan pengentasan kemiskinan di perkotaan. Hal lain dengan partisipasi masyarakat meningkat maka dana program P2KP mampu sebagai *refunding of business* (dana bergulir) untuk usaha mikro. Agar mampu mengurangi kemiskinan di perkotaan.

1) Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberhasilan Penataan Kemiskinan di Perkotaan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengujian statistik partisipasi masyarakat memiliki pengaruh secara simultan terhadap keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Berpengaruhnya partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan penataan penanggulangan kemiskinan diduga masih ada variabel lain yang berpengaruh. Faktor lain yang tidak diteliti itu sebagaimana dikemukakan oleh Grindile, Ada 5 faktor penyebab keberhasilan/kegagalan suatu pelaksanaan pembangunan yakni; Masukan sumber daya yang tersedia, Struktur dan sistem pemerintah, Komitmen dari para pelaku, sistem perencanaan, dan leverage dari pihak oposan untuk memperoleh peluang yang sama dalam memanfaatkan hasil kebijakan ". (Israwan, 1999:91). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Supriatna (1997) " Keberhasilan program pembangunan ditentukan oleh berbagai faktor yang meliputi sumber daya manusia, program dan kegiatan, metode pembinaan keterampilan, prosedur penggunaan dana, dan penerahan sumber daya organisasi lainnya ".

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa partisipasi bukanlah sebagai input (faktor) yang dapat mempengaruhi proses pembangunan, tetapi lebih sebagai output (hasil) dari pembangunan tetapi, faktor pemerintahlah yang lebih dominan dalam menentukan keberhasilan/kegagalan program pembangunan. Artinya, penataan penanggulangan kemiskinan tidak akan tercapai hanya datang

dari Pemerintah tapi tumbuhkan partisipasi masyarakat secara efektif. Untuk itu partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha terus dikembangkan melalui arus bawah. Ini sejalan dengan hasil temuan menunjukkan partisipasi dalam penataan kelembagaan usaha perlu di optimalkan, seperti mengembangkan usaha mikro yang selama ini telah berjalan melalui dana program P2KP.

2) Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Keberhasilan Penataan Kemiskinan perkotaan

Hasil penelitian ini membuktikan secara simultan maupun parsial kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan/kegagalan program pengentasan kemiskinan. Rendahnya kualitas SDM yang dimiliki penduduk miskin dalam penelitian ini cenderung mengakibatkan tidak berhasilnya program penanggulangan kemiskinan. Dari temuan dilapangan pada umumnya masyarakat miskin tidak memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian yang memadai.

Mengingat SDM merupakan faktor yang penting dalam upaya mengatasi kemiskinan maka, hal yang dapat dilakukan adalah bahwa orientasi pembangunan khususnya pengentasan kemiskinan haruslah diprioritaskan pada upaya peningkatan kualitas SDM. Upaya ini dapat dilakukan dengan pemberian kesempatan yang luas kepada penduduk miskin untuk bersekolah kejenjang yang lebih tinggi, sedangkan upaya untuk peningkatan pendidikan non formal dapat dilakukan dengan semakin seringnya intensitas dalam pemberian diklat, dan magang dalam pembenahan usaha-usaha mikro. Sebab selama ini penduduk miskin belum mendapat kesempatan mengikuti diklat yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta. Pernyataan ini sejalan dengan apa dikemukakan oleh Philip H Coombs:

Upaya untuk mengatasi kemiskinan di negara berkembang adalah dengan program pembangunan pendidikan yang berorientasi kepada masyarakat miskin melalui pendidikan (formal, informal dan nonformal) terutama kalangan petani, nelayan, pedagang kecil, buruh dan pengrajin. (Supritna , 1997:26).

Diharapkan dengan diberikannya penduduk miskin untuk mendapatkan pendidikan, maka kualitas mereka akan meningkat, dengan kualitas sumber daya yang meningkat maka keberhasilan penataan pengentasan kemiskinan pun akan tercapai. Sebagaimana hasil penelitian Naning, putu (2002) “ Kualitas SDM mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Semakin baik kualitas SDM, semakin tinggi tingkat keberhasilan program pembangunan ”.

6. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil kajian tentang PENATAAN LINGKUNGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (Studi Pada Program P2KP di Kota Bandung) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Partisipasi masyarakat, kualitas sumber daya manusia secara langsung dan bersama-sama berpengaruh positif terhadap keberhasilan penataan lingkungan kemiskinan perkotaan melalui penataan kemiskinan di perkotaan

(P2KP) di kota Bandung. Untuk itu dukungan partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas sumberdaya menjadi perhatian optimal bagi pembuat kebijakan.

- 2) Secara parsial partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap keberhasilan penataan kemiskinan perkotaan melalui penataan penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) di kota Bandung.
- 3) Secara parsial kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap keberhasilan penataan kemiskinan perkotaan melalui program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) di kota Bandung.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka ada beberapa hal yang dapat peneliti rekomendasikan, antara lain:

- 1) Karena secara simultan partisipasi masyarakat, kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penataan lingkungan kemiskinan perkotaan melalui penataan penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) di kota Bandung. Untuk itu program penanggulangan kemiskinan lebih berhasil dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka partisipasi dan kualitas sumberdaya harus lebih ditingkatkan diintensifkan lagi.
- 2) Usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat miskin , selain meningkatkan tingkat pendidikan formal dalam jangka panjang dengan memberikan kesempatan pendidikan gratis. Pendidikan non formal seperti diklatpun perlu diberikan kepada anggota KSM. Kenyataannya di lapangan diklat hanya dinikmati oleh para ketua kelompok, sedangkan anggota yang lain tidak merasakan. Karena dimensi pengalaman yang paling dominan, maka perlu adanya perhatian khusus dalam pemberian pinjaman bantuan yakni, harus memperhatikan pengalaman dari anggota KSM.
- 3) Mengingat program P2KP ini masih berjalan, maka hendaknya untuk penelitian ke depan lebih komprehensif dan intensif lagi baik dari segi isi, metode maupun alat analisisnya, serta dapat mengungkap faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP), seperti; perilaku kewirausahaan, penataan Usaha Mikro dan kemampuan pengurus BKM.

Daftar Pustaka

- Al Jufri, Asri. 2005, *Penyebab Kegagalan Pendekatan Kelompok Dalam Pembiayaan Mikro: Studi Kasus P2KP*. Jakarta: Usahawan.
- Bappeda, 2004, *Progres Report P2KP di Kota Bandung 2004*. Bandung: Bappeda.
- Billah, M.M, 1987. *Menatap Masalah Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kajian Masyarakat Indonesia.
- Ginting, Atom. 1999. *Hubungan Antara Kemampuan Managerial Kepala Desa Dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Pelaksanaan Program IDT (Studi Kasus di Desa-Desa Kab. Ciamis)*, Disertasi, Unpad, Bandung.
- Hufron Sofiyanto. 2006. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program penanggulangan kemiskinan (studi pada program P2KP di Kota Bandung, Skripsi-UPI, Bandung

- Israwan, Paulus. 2000. *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Inpres Desa Tertinggal (IDT)*, Disertasi, Unpad, Bandung.
- Moebyarto. 1991. *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*, Aditya Media, P3KP. Yogyakarta: UGM.
- Mulyati, Ratna. 2004. *Pengaruh Motivasi Usaha anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kel. Isola Kec. Sukasari*, Skripsi, UPI Bandung.
- Naning, Putu. 2002. *Pengaruh SDM, Partisipasi Masyarakat, Peran Pemerintah Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan di Denpasar*, Tesis, Unpad, Bandung.
- Robbin, P, Stephen. 1994. *Teori Organisasi Struktur, Desain, dan Aplikasi*. Jakarta: Arcan.
- Siawan, Rahmat. 2004. *Arah Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah*, Bandung: Bappeda.
- Sumodiningrat. 1999. *Kemiskinan, Teori, Fakta, dan Kebijakan*. Jakarta: Gramedia.
- Supriatna, Tjahya. 1997. *Birokrasi, Pemberdayaan, dan Pengentasan Kemiskinan*, Bandung: Penerbit HUP Press.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pedekatan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moeljarto Tjokrowinoto. 1993. *Politik Pembangunan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Todaro, P, Michae. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.